

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU

Mona Silviany

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

Social welfare policy for elderly is a policy to improve the productivity and life quality of elderly through the program of Productive Economic Business. To realize the policy, the implementation is needed, so that the program of productive economic Business can increase the social welfare of elderly. The research objective is to analyze the implementation of the social welfare policy (law No.13 of 1998 on social welfare for elderly). Social minister makes a policy of social services for elderly in the form of productive economic business program as a social investment for the productive elderly in the District of West Palu. This is a qualitative descriptive research. The data collection is through observations, interviews and documentation. The theory used is a theoretical model of policy implementation By Rippley and Franklin, due to the implementation model Rippley and Franklin emphasizes on the aspects of policy content. According to Rippley and Franklin, success of a program implementation can be viewed by the three factors; a) compliance perspective which measures obedience of apparatus; b) successful implementation is measured from the fluency routines and lack of problems, and c) a successful implementation leads to the satisfactory performance of all parties, especially the group of beneficiaries. The results showed that the implementation of the Social Welfare Policy For Elderly In The District Of West Palu has been performed well.

Keywords: *Implementation of Welfare For Elderly, Routines Satisfactory Performance.*

Data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2010 jumlah lanjut usia (LANSIA) di Indonesia mencapai 18,04 juta jiwa (sumber; Dirjen.Rehabilitas Sosial Kementerian Sosial RI,2011). Di Sulawesi Tengah data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah di tahun 2013 jumlah Lanjut usia (LANSIA) 159.439 jiwa yang terdiri dari 30.851 jiwa berkelamin laki-laki dan 29.303 jiwa berkelamin perempuan, dengan usia antara 60-64 tahun, lanjut usia (LANSIA) di atas 65 tahun di Sulawesi Tengah berdasarkan jenis kelamin terdapat 48.116 jiwa berjenis kelamin laki-laki, dan 51.169 jiwa berjenis kelamin perempuan (Sumber; Sulawesi Tengah dalam Angka 2013).

Disisi lain kesadaran penduduk lanjut usia (LANSIA) untuk mempersiapkan masa tuanya masih sangat relatif rendah, baik dari segi fisik,psikologis, sosial maupun ekonomi. Kondisi ini berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak dasar lanjut usia

(LANSIA), terutama pemenuhan kebutuhan sehari-hari berupa kebutuhan pokok, kesehatan, aksesibilitas dan lainnya.

Dalam pandangan kultur sosial, sebagian masyarakat kita terlanjur memberi penilaian yang kurang tepat terhadap eksistensi lanjut usia (LANSIA), misalnya di sebut sebagai manusia yang tidak produktif, tidak mandiri, menjadi beban keluarga dan lingkungan masyarakat.

Sehubungan dengan kondisi lanjut usia (LANSIA) tersebut di atas, diperlukan adanya peran keluarga, masyarakat untuk menjaga, membimbing, dan yang lebih diharapkan adalah kehadiran pemerintah dalam bentuk kebijakan (*policies*) dan pelayanan (*services*) sebagai cermin sebuah negara yang menghargai dan menghormati masyarakatnya khususnya terhadap lanjut usia (LANSIA) di tanah air yang berdasarkan religitas dan moralitas ini.

Penduduk Lanjut usia (LANSIA) adalah realitas sosial yang harus dihadapi terutama memecahkan masalah kesejahteraan sosialnya, bagi pemerintah kebijakan dan pelayanan menjadi kata kunci terhadap pemecahan masalah Lanjut usia (LANSIA). Pelayanan tentunya di berikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup lanjut usia (LANSIA) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, pada pasal 3 dan 4 disebutkan bahwa semua pihak harus berperan dalam meningkatkan kesejahteraan yang bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup, masa produktif, kemandirian dan kesejahteraan Lanjut Usia (LANSIA). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 inilah yang menjadi fokus penelitian, melihat implementasinya dengan menggunakan pedoman keputusan Menteri Sosial nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (LANSIA).

Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.

Pemerintah bersama masyarakat dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada lanjut usia yang potensial maupun non- potensial. Upaya nyata untuk mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 telah banyak dilakukan melalui berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan, baik dalam dan luar panti sudah dilaksanakan oleh kementerian sosial. Namun harus diakui kedua sistem pelayanan tersebut belum dapat sepenuhnya mengatasi seluruh permasalahan yang dihadapi para lanjut usia. Sehingga perlu diciptakan alternatif model pelayanan yang lebih bersifat komprehensif melibatkan berbagai elemen masyarakat, lintas program dan lintas sektor, dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan berkesinambungan disesuaikan dengan kondisi lanjut usia, yang

selanjutnya bagi penulis menyebutnya sebuah sistem pemberdayaan.

Sistem pemberdayaan menjadi alternatif yang dipandang lebih manusiawi, sebab para lanjut usia lebih berperan, muncul kreatifitas dan lepas dari sifat ketergantungan pada orang lain, sebab permasalahan tidak hanya terkait lanjut usia, melainkan permasalahan kemiskinan menjadi masalah utama bagi lanjut usia dan keluarganya. Dalam jangka panjang sistem pemberdayaan menjadi investasi sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup lanjut usia secara berkesinambungan. Pemberdayaan yang dimaksud adalah program pengembangan Investasi Sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Tujuan Program Investasi Sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) lanjut usia adalah untuk memberikan kesempatan kepada lanjut usai sehat, aktif, dan produktif yang terpilih agar tetap memiliki kegiatan usaha, yang mampu menjamin kapasitas ekonomi dan sosialnya.

METODE

Penelitian yang hendak dilakukan adalah penelitian kualitatif. Sejumlah pakar memberikan pendapatnya tentang penelitian kualitatif, diantaranya menurut Satori, D dan Komairah (2011: 22-25), bahwa penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut merupakan hasil dari pengumpulan data yang valid yaitu melalui wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumen, dan dengan melakukan Triangulasi

Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat di pahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Ilmuwan lain seperti Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010 : 4) mendefenisikan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya Moleong (2010: 6) mensintesis definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, karakteristik, situasi atau kejadian pada suatu daerah tertentu secara sistematis, faktual dan akurat sebagaimana adanya. Penelitian dilakukan di Kecamatan Palu Barat Kota Palu selama 3 (tiga) bulan semenjak surat izin penelitian di keluarkan oleh Universitas Tadulako. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada hasil observasi penulis dimana di Kecamatan Palu Barat terdapat sejumlah sarana dan prasarana Lanjut Usia, seperti Pondok/Panti dan masih terdapat jumlah penduduk lanjut usia yang produktif tersebar dan menjadi penduduk di daerah tersebut belum mendapatkan program investasi sosial berupa program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu dengan memilih orang-orang yang dianggap mengetahui dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus permasalahan yang akan di teliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2012 : 85), yang menyatakan bahwa *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu . Demikian

pula menurut Faisal yang mengutip pendapat Spradley dalam Satori (2011: 55) menyatakan bahwa :

“ Sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang telah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber”

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka informan yang dipilih pada penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari :

- A. Target Group sebanyak 3 orang;
 1. Pengelola Panti Lanjut Usia di Kecamatan Palu Barat; 1 orang
 2. Pengelola Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lanjut Usia produktif, dari Dinas Sosial Provinsi; 1 orang.
 3. Lanjut usia produktif penerima bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ; 1 orang
- B. Implementor ; 2 orang dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Implementasi Kebijakan investasi sosial program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Dinas Sosial di Kecamatan Palu barat Kota Palu adalah pelaksanaan kebijakan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia) oleh Menteri Sosial Republik Indonesia dikeluarkan pedoman pelayanan sosial lanjut usia Nomor. 19 Tahun 2012, yang belum terlaksana secara baik, untuk mengetahui

apakah terimplementasi secara baik atau tidak, maka perlu dilakukan penelitian dengan melihat apakah dalam pelaksanaannya telah mempedomani peraturan kebijakan menteri sosial RI atau tidak. Berikut ini penulis uraikan definisi konsep penelitian yang menggunakan analisis Model Implementasi Kebijakan teori Rippley dan Franklin yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yang menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, yaitu:

1. Tingkat Kepatuhan aparatur; Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia sangat tergantung pada sikap dan mentality pelaksana/implementor yang diwujudkan pada tindakan berupa kepatuhan dan taat azas dalam melaksanakan program Usaha Ekonomi produktif (UEP) bagi kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Produktif.
2. Kelancaran dan tidak adanya persoalan; Para implementor program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk Lanjut Usia produktif sedapat mungkin mengeliminir dan mereduksi setiap permasalahan yang timbul selama proses implementasi, setiap implementor berperan sebagai *problem solver* bukan sebaliknya menjadi pelaksana program/implementor yang memicu permasalahan.
3. Kinerja; Kinerja Para implementor atau pelaksana program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada akhirnya akan bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. kinerja kebijakan bagi kesejahteraan Lanjut Usia, apakah pihak yang menerima bantuan tersebut merasa puas terutama Lanjut Usia Produktif yang menjadi sasaran kebijakan. Efektifnya proses implementasi kebijakan bagi kesejahteraan Lanjut Usia produktif tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektifitas dan optimalisasi kinerja kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi

Lanjut Usia Produktif ditentukan oleh kinerja individu dan para implementor dari kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan informasi dan data yang di peroleh di lapangan selama penelitian bahwa implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia) dapat penulis simpulkan bahwa implementasi kebijakan program UEP di Kecamatan Palu Barat telah memenuhi harapan bagi penerima manfaat, yaitu para Lansia, dan bagi implementor merupakan bentuk kinerja yang membawa prestasi sebagai pengelola maupun sebagai pengambil kebijakan.

Selain itu Progran UEP bagi Lanjut Usia bisa saja mengalami perubahan dalam arti mendapat evaluasi kembali apakah perlu dipertahankan atau di teruskan.

Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) faktor yang hendak dibahas, dimana faktor-faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, terutama kebijakan yang bersifat program pelayanan. 3 (tiga) faktor yang maksud adalah factor-faktor yang dikemukakan oleh Rippley dan Franklin, dimana implementasi kebijakan menekankan pada aspek isi kebijakan (*content of policy*). Menurut Rippley dan Franklin dalam (Hasbullah.2012; 67) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program di tinjau dari tiga faktor meliputi; a) Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana; b) Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan; dan c) Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program.

Dalam pembahasan hasil penelitian ini, penulis mengemukakan sejumlah data yang diperoleh selama penelitian, terutama data hasil wawancara dengan sejumlah informan yang kredibel di bidang Program kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lansia) di Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

A. Faktor Kepatuhan atau ketaatan aparatur (aparatur sebagai implementor).

Perspektif kepatuhan atau ketaatan aparatur/implementor menjadi dasar berpijak implementasi dari isi sebuah kebijakan, apakah terimplementasi secara baik atau tidak, sebab dalam melakukan implementasi, para pelaksana/implementor terikat oleh kepatuhan terhadap isi kebijakan itu sendiri. Kita sering menyaksikan berbagai kebijakan dalam bentuk program gagal atau mengalami hambatan, tidak terlaksana dengan baik, bukan karena faktor datang dari luar saja yang mempengaruhinya, justru kegagalan program lebih disebabkan oleh faktor internal dari pelaksana atau implementor itu sendiri, ketidak taatan atau kepatuhan para pelaksana/implementor terhadap isi kebijakan, arah atau mekanisme yang telah ditetapkan membawa konsekuensi atas keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.

Dan oleh karena itu para pelaksana/implementor seharusnya memiliki karakter pengabdian yang sungguh-sungguh, penuh dengan kehati-hatian, selain itu wujud dari ketaatan atau kepatuhan para implementor adalah rasa tanggung jawab terhadap program yang hendak dilaksanakan atau diimplementasikan. Kepatuhan atau ketaatan para pelaksana/implementor dituntut pula memiliki jiwa keikhlasan ketulusan, kepribadian para implementor untuk menjalankan program dalam arti sebagai pelayanan publik.

Berkaitan dengan fokus penelitian ini, fokus penelitian implementasi kebijakan program kesejahteraan Sosial lanjut usia

(lansia), berupa program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lanjut Usia, maka kepatuhan atau ketaatan para implementor menjadi faktor penentu terselenggaranya pelayanan bagi lanjut usia (lansia) tersebut. Selanjutnya kepatuhan atau ketaatan implementor dalam mengimplementasikan program UEP bagi Lanjut Usia dapat penulis lihat dari aktivitas pengendalian mutu, yang meliputi :

Monitoring; Monitoring atau pemantauan merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan program UEP bagi Lanjut Usia, dan ketepatan pemanfaatan dana bantuan . Monitoring juga dimaksudkan untuk memastikan apakah program UEP bagi Lanjut Usia berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku. Monitoring harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah dan menjadi tanggung jawab mutlak para implementor sebagai pemberi bantuan investasi sosial untuk Lanjut Usia.

Teori implementasi model Rippley dan Franklin yang menekankan pada faktor ketaatan atau kepatuhan para implementor tidak terbantahkan tepat digunakan dalam penelitian ini, sebab program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lanjut Usia (lansia) membutuhkan kepribadian yang taat atau patuh terutama jujur dalam melaksanakan isi kebijakan berupa program yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan tersebut.

Penelitian yang mengambil lokasi khusus (Lokus) di Kecamatan Palu Barat Kota Palu sebagai pusat pengambilan data primer diharapkan oleh penulis akan memperoleh kejelasan implementasi kebijakan Menteri Sosial tentang kesejahteraan sosial bagi lanjut usia (lansia) melalui program UEP. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mewawancarai sejumlah informan untuk mengetahui ketaatan atau kepatuhan implementor terhadap implementasi kebijakan program UEP bagi lanjut Usia di Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Selanjutnya kepatuhan atau ketaatan

implementor dalam mengimplementasikan program UEP bagi Lanjut Usia dapat penulis lihat dari aktivitas pengendalian mutu, yang meliputi :

1. Monitoring; Monitoring atau pemantauan merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan program UEP bagi Lanjut Usia, dan ketepatan pemanfaatan dana bantuan. Monitoring juga dimaksudkan untuk memastikan apakah program UEP bagi Lanjut Usia berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku. Monitoring harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah dan menjadi tanggung jawab mutlak para implementor sebagai pemberi bantuan investasi sosial untuk Lanjut Usia. Selanjutnya penulis melakukan pendalaman tentang ketaatan atau kepatuhan implementor terhadap isi kebijakan program UEP bagi Lanjut usia, pendalaman itu meliputi aspek-aspek yang perlu dimonitoring, bagi penulis ini penting karena akan kelihatan interaksi antara implementor dengan ketaatan atau kepatuhan itu sendiri. Aspek –aspek itu antara lain:

- a. Proses sosialisasi;
- b. Proses seleksi proposal;
- c. Proses penetapan penerima;
- d. Proses penyaluran dana; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan.

Untuk memberi kualitas data pada penelitian ini menyangkut ketaatan atau kepatuhan para implementor program UEP bagi Lanjut Usia

2. Evaluasi; Evaluasi merupakan bentuk yang sangat sederhana untuk melihat tingkat ketaatan atau kepatuhan implementor, program UEP bagi Lanjut Usia dengan menerima dana perlu dilakukan evaluasi, tujuannya tidak hanya ingin mengetahui manfaat bantuan tetapi lebih dari itu, dimana apakah program ini perlu dipertahankan, diteruskan atau dihentikan.

Evaluasi secara teknis dilakukan oleh para implementor paling sedikit dilakukan

sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Pelaksanaan evaluasi penggunaan dana bantuan dilakukan sebagai mana ketentuan yang berlaku dilakukan oleh pemberi bantuan yaitu Direktorat pelayanan sosial Lanjut Usia, ini dimaksudkan tidak hanya ingin mengetahui penggunaan dana bantuan tapi lebih dari itu bermaksud mengevaluasi ketaatan atau kepatuhan para implementor.

B. Faktor Kelancaran dan tidak adanya persoalan/masalah yang berarti

Kelancaran dan tidak adanya persoalan; Para implementor program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk Lanjut Usia produktif sedapat mungkin mengeliminir dan mereduksi setiap permasalahan yang timbul selama proses implementasi, setiap implementor berperan sebagai *problem solver* bukan sebaliknya menjadi pelaksana program / implementor yang memicu permasalahan.

Ukuran keberhasilan implementasi kebijakan program UEP bagi Lanjut usia, tolok ukur yang penulis gunakan adalah factor kelancaran dan tidak adanya persoalan atau masalah sebagaimana teori implementasi Rippley dan Franklin, menurut Rippley dan Franklin, keberhasilan implementasi kebijakan program ditentukan oleh factor kelancaran dan tidak adanya persoalan atau masalah yang berarti. Teori implementasi Rippley dan Franklin, bukan meniadakan masalah tetapi tidak adanya masalah yang berarti. Masalah yang sering timbul dalam implementasi justru lahir dari para implementor, bukan dari isi kebijakan. Sebaliknya tidak ditemukan masalah berarti jika para implementor taat atau patuh pada ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan informasi dari para informan di atas, penulis mendalaminya dari berbagai aspek yang bisa saja menjadi penghambat ketidak lancaran implementasi kebijakan program UEP bagi lanjut Usia, namun hambatan tersebut tidak berarti mengurangi

laju implementasi yang dilakukan oleh implementor di lapangan, yaitu :

- a. Sasaran program; sasaran program jelas mengundang perdebatan, karena menyangkut tujuan dan cara mencapai tujuan, terutama menghindari dari program salah sasaran.
- b. Penerimaan masyarakat; Penerimaan masyarakat terhadap program sering menjadi masalah karena ada unsur kepentingan secara politis.
- c. Adanya perumusan Kriteria lanjut usia penerima manfaat program UEP. Misalnya; Kriteria fisik, psikis, sosial ekonomi, kesehatan dan keberdayaan lansia yang berhak menerima bantuan.

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat penulis dalam bahwa ada permasalahan yang timbul pada saat implementor melakukan implementasi, namun segera dapat di atasi. Masalah itu antara lain:

1. Cara seleksi penerima manfaat bantuan; misalnya pertimbangan yang mendasari seleksi lansia yang masuk calon penerima bantuan secara administrasi lanjut usia yang memiliki embrio usaha.
2. Termasuk kategori miskin sesuai dengan kriteria sosial-ekonomi-budaya setempat.
3. Masih mampu melakukan aktivitas dan mampu berkomunikasi.
4. Dikategorikan sehat jasmani dan rohani.

Disini permasalahannya dimana yang berhak menentukan lansia yang terpilih adalah lembaga pendamping/pengelola usaha yang ditunjuk oleh dinas sosial kabupaten atau kota atas rekomendasi dari pihak Kepala Desa atau kelurahan setempat yang dikonsultasikan dengan pihak Dinas Sosial Kota. Untuk memperoleh data yang valid kembali peneliti mewawancarai informan, Bapak Moh.Rizal, pengelola UEP lansia Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tentang kelancaran pelaksanaan program UEP bagi Lanjut Usia di Kecamatan Palu Barat, yang dapat disimpulkan bahwa mekanisme seleksi calon penerima bantuan dana program UEP bagi Lanjut Usia di kecamatan palu

Barat dilakukan sesuai mekanisme peraturan yang ada sehingga tidak ada hambatan berarti, semua pihak menerima keputusan karena penerima manfaat diputuskan berdasarkan skala prioritas umur, kesanggupan beraktivitas, keberadaan embrio usaha, kesehatan fisik dan mental, dukungan keluarga, kondisi kemiskinan yang bersangkutan.

Berdasarkan informasi dari sejumlah informan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan program UEP bagi Lanjut Usia di Kecamatan Palu barat Kota palu, tidak mengalami hambatan dari faktor kemiskinan dan tidak adanya masalah atau ada masalah tapi tidak berarti bagi implementor melakukan kegiatan UEP.

C. Faktor Kinerja

Kinerja; Kinerja Para implementor atau pelaksana program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada akhirnya akan bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. kinerja kebijakan bagi kesejahteraan Lanjut Usia, apakah pihak yang menerima bantuan tersebut merasa puas terutama Lanjut Usia Produktif yang menjadi sasaran kebijakan. Efektifnya proses implementasi kebijakan bagi kesejahteraan Lanjut Usia produktif tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektifitas dan optimalisasi kinerja kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lanjut Usia Produktif ditentukan oleh kinerja individu dan para implementor dari kebijakan tersebut.

Menurut Rippley dan Franklin Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program., untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan program UEP bagi Lanjut Usia di kecamatan palu Barat dari faktor kinerja terutama melihat tingkat kepuasan pihak penerima manfaat, maka penulis mewawancarai informan Ibu Rohana

Lahase, sebagai penerima manfaat bantuan program UEP. yang dapat disimpulkan bahwa dana bantuan UEP bagi saya sebagai penerima manfaat terasa memberikan perubahan dalam hal pendapatan serta memberikan kesibukan yang berguna selama ini.

Hal yang sama dibenarkan oleh informan, Bapak Moh Rizal, Pengelola UEP lanjut usia Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, yang dapat disimpulkan bahwa : Kami sebagai pengelola program UEP terus melakukan pelayanan dengan kinerja yang dapat memberikan manfaat bagi penerimanya. Kedua informan di atas secara jelas memberikan informasi bahwa kehadiran kebijakan program UEP bagi lansia khususnya di Kecamatan Palu Barat terasa manfaatnya. Bagi penerima manfaat program investasi sosial melalui UEP lansia ini sesuai harapan, dimana kegiatan usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh lansia dan dikelola sesuai dengan usulan yang tertulis dalam proposal. Selain itu manfaat yang diharapkan dari dana bantuan investasi sosial ini adalah terselenggaranya kegiatan UEP lansia yang mampu berkesinambungan dan membantu kehidupan lansia penerima manfaat.

Berdasarkan informasi di atas, maka penulis beranggapan bahwa implementasi kebijakan program UEP di Kecamatan Palu Barat telah memenuhi harapan bagi penerima manfaat, yaitu para Lansia, dan bagi implementor merupakan bentuk kinerja yang membawa prestasi sebagai pengelola maupun sebagai pengambil kebijakan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Lanjut/ usia Di Kecamatan Palu Barat Kota Palu adalah sudah terlaksana dengan baik, sesuai analisis teori implementasi kebijakan

Ripley dan Franklin, dimana ke-tiga faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan program UEP bagi lansia telah terpenuhi, 3 (tiga) faktor tersebut adalah: 1) Faktor Kepatuhan atau ketaatan aparatur (aparatur sebagai implementor), 2) Aspek Kelancaran dan tidak adanya persoalan/masalah yang berarti, dan, 3) Faktor Kinerja.

Rekomendasi

Mengingat Program UEP bagi Lanjut usia sangat bermanfaat maka dapat disarankan kiranya ada kesinambungan program tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alam. Seluruh puji hanya bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat serta salam disampaikan kepada Junjungan Nabi Akhir Zaman Rasulullah Muhammad SAW. Sangat disadari oleh peneliti bahwa penyusunan artikel ini dapat terlaksana hanya karena kuasa Allah Ta'ala sehingga penyusunan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini, saya menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Dr. Muh. Nawawi, M.Si. dan Dr. Nawawi Natsir, M.Si. selaku ketua dan anggota tim pembimbing serta penyunting, penyunting ahli dan ketua penyunting yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian penulisan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Dunn, William N. 2000. *Public Personnel Management and public policy*. New York : Addison Wesley Longman.
- Edi Suharto. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Penerbit CV. Alfabeta Bandung.

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princetown University Press, New Jersey.

Hoogwood, Brian W. & Lewis A. Gunn. 1986. *Policy Analysis for the Real World*. Princeton University Press.

Keban, YT. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gama Media.

Moloeng, L.J. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Riant Nugroho, 2003. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.